BAB II

HISTORISITAS HUKUM DI INDONESIA, RESTORATIVE JUSTICE DAN KEARIFAN LOKAL

A. Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Barat di Indonesia

Di dunia ini, setidaknya terdapat lima sistem hukum utama yaitu (1) sistem hukum sipil (*civil law*) yang berasal dari hukum Romawi dan diterapkan di banyak negara Eropa Barat dan negara bekas jajahannya; (2) sistem hukum *Anglo-Saxon (common law)* yang berkembang di Inggris dan bekas jajahannya, (3) sistem hukum Islam, yang dianut orang Islam dimanapun ia berada yang mengatur aspek-aspek kehidupan pribadi dan komunitas; (4) sistem hukum adat yang berkembang dalam masyarakat tradisional berdasarkan kebiasaan dan praktik lokal, sering ditemukan di Asia dan Afrika; serta (5) sistem hukum negara-negara blok timur (sosialis) yang dipengaruhi oleh ideologi *Marxisme-Leninisme*, menekankan peran negara dalam mengatur kehidupan ekonomi dan sosial.¹

Dari kelima sistem hukum tersebut, di Indonesia, terdapat tiga sistem hukum yang berlaku: (1) hukum adat yang berdasarkan tradisi lokal, (2) hukum Islam yang mengatur kehidupan umat Muslim, dan (3) hukum Barat (*civil law*) yang berbasis pada undang-undang tertulis dan regulasi resmi negara.

Interaksi antara ketiga sistem ini menciptakan kerangka hukum yang kompleks di Indonesia, mencerminkan pluralisme hukum yang perlu diharmonisasikan untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum yang optimal.

1. Sejarah Hukum Islam di Indonesia

Islam di Nusantara memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari perkembangan Islam di wilayah lain di dunia.² Islam masuk ke Nusantara melalui jalur perdagangan, pendidikan, dan dakwah yang dilakukan oleh para

¹ Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, edisi keen. (Jakarta: Rajawali Pers, 2009). hal 208

² Nanda Khairiyah and Ali Abdillah, "Peradaban Islam Nusantara Mewarnai Corak Keislaman Di Asia Tenggara Islam Nusantara Civilization in Coloring Islamic Pattern in the Southeast Asia," *Agustus* 4, no. 2 (2023): 157–169.

pedagang, ulama, dan mubaligh dari Arab, Persia, India, dan Cina secara damai tanpa adanya penaklukan militer besar-besaran. Proses penyebaran Islam ini diwarnai dengan akulturasi budaya, di mana banyak tradisi lokal yang disesuaikan dengan ajaran Islam, sehingga masyarakat dapat menerima Islam tanpa harus meninggalkan budaya mereka.³

Peran penting para ulama dan Wali Songo⁴ yang berdakwah dengan penuh kebijaksanaan dan adaptif terhadap budaya lokal, serta pengaruh Sufisme yang menekankan aspek spiritual dan mistik Islam, mempercepat proses Islamisasi di Nusantara. Konflik militer besar hampir tidak ada dalam sejarah Islam di Nusantara, dengan perluasan pengaruh kerajaan Islam seringkali dilakukan melalui diplomasi, perkawinan, dan aliansi strategis. Selain itu, sistem pendidikan melalui pesantren menjadi pilar utama dalam penyebaran dan penguatan Islam di Nusantara, mencetak generasi Muslim yang terdidik dan berpengaruh.

Islam masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7 hingga ke-13 melalui jalur perdagangan yang dilakukan oleh pedagang Arab, Persia, dan Gujarat. Para pedagang ini tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga menyebarkan ajaran Islam, terutama di wilayah pesisir seperti Sumatra, Jawa, dan Sulawesi.⁵

Selain pedagang, ulama dan mubaligh juga memainkan peran penting dalam penyebaran Islam dengan mendirikan masjid dan lembaga pendidikan Islam. (pesantren)⁶ Penguasa lokal yang menerima Islam kemudian mulai menerapkan hukum Islam dalam pemerintahan mereka, seperti yang terlihat dalam Kesultanan Samudera Pasai di Sumatra, Kesultanan Demak di Jawa, dan Kesultanan Ternate di Maluku.

Pada masa kerajaan-kerajaan Islam, seperti Kesultanan Demak, Cirebon, Banten, dan Aceh, hukum Islam diterapkan sebagai dasar hukum negara, terutama dalam bidang pernikahan, warisan, zakat, dan hukum pidana.

³ Wahidin dan Arisman, *Sosio Historis Islam Asia Tenggara*, Cetakan Pe., vol. 6 (Riau: Kalimedia, 2021). hal 59

⁴ Dicky Darmawan and M Makbul, "Peran Walisongo Dalam Mengislamkan Tanah Jawa: Perkembangan Islam Di Tanah Jawa," *Wahana Karya Ilmiah Pendidikan* 6, no. 02 (2022): 11–20.

⁵ Dalimunthe Dalimunthe, "Kajian Proses Islamisasi Di Indonesia (Studi Pustaka)," *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 12, no. 1 (2017): 115–125.

⁶ Zilfadlia Nirmala and Duski Samad, "Sejarah Islam Masuk Ke Indonesia Dan Islam Zaman Kontemporer," *Jurnal Magister Sejarah Peradaban Islam* 02, no. 02 (2023): 30–43.

Beberapa kerajaan membentuk lembaga peradilan yang menjalankan hukum Islam, seperti Qadhi (hakim) yang mengadili perkara-perkara berdasarkan syariat Islam.⁷

Ketika Belanda mulai mendominasi Nusantara pada abad ke-17, mereka memperkenalkan sistem hukum Eropa Kontinental⁸ dan membatasi penerapan hukum Islam. Hukum Islam tetap diterapkan dalam urusan personal seperti pernikahan dan warisan, tetapi secara umum dibatasi oleh kebijakan hukum kolonial yang lebih mengutamakan hukum adat dan hukum Barat. Pemerintah kolonial Belanda menerapkan dualisme hukum di mana hukum Islam dan hukum adat diakui untuk masyarakat pribumi, sementara hukum Barat diterapkan untuk masyarakat Eropa dan Timur Asing.⁹ Pada tahun 1882, pemerintah kolonial membentuk Pengadilan Agama untuk menangani perkara-perkara hukum Islam.¹⁰

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, hukum Islam diakui sebagai salah satu bagian dari sistem hukum nasional.¹¹ Undang-Undang Dasar 1945 memberikan pengakuan terhadap agama Islam dan kebebasan menjalankan syariat Islam. Pemerintah Indonesia kemudian membentuk Pengadilan Agama yang memiliki yurisdiksi atas perkara-perkara tertentu seperti pernikahan, perceraian, warisan, dan wakaf.¹² Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memperkuat posisi Pengadilan Agama dalam sistem peradilan nasional.¹³

⁷ Ali Akbar et al., "Sejarah Hukum Islam Di Indonesia Pada Masa Kerajaan Hingga Merdeka," *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 4695–4709.

⁸ Novi Eka Saputri and Eny Kusdarini, "Kontribusi Sistem Hukum Eropa Kontinental Terhadap Pembangunan Sistem Hukum Nasional Di Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 4 (2021): 363–372.

⁹ Nandang Albian, "Pengaruh Sistem Hukum Eropa Kontinental Dan Sistem Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Nasional," *At-Tatbiq : Jurnal Jurnal Ahwal al-Syakhsyiyah (JAS) Volume 04 Edisi 01 04* (n.d.): 57–75.

¹⁰ Al-Habsy Ahmad, "Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Hukum Eropa Kontinental Dan Anglosaxon Dalam Sistem Peradilan Di Negara Republik Indonesia," *Petitum* 9, no. 1 (2021): 51–65.

¹¹ Vina Aprilia, "Analisis Kedudukan Hukum Islam Dalam," *Jurnal Hukum Diktum* 10, no. 2 (2012): 166–172.

¹² Qurratul Aini Wara Hastuti, "Kewenangan Pengadilan Agama Kudus Dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf," *ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf* 1, no. 1 (2014): 55–81.

¹³ Suherman, "Kedudukan Dan Kewenangan Peradilan Agama," *Al Maslahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 7 (2017): 675–689.

Pada era reformasi, penerapan hukum Islam semakin diperluas, termasuk dalam bentuk perda syariah di beberapa daerah. Di Aceh,¹⁴ sebagai bagian dari otonomi khusus, hukum syariat Islam diterapkan secara lebih luas¹⁵ mencakup hukum pidana.¹⁶ Hukum Islam juga berpengaruh dalam legislasi nasional seperti Undang-Undang Perkawinan,¹⁷ Undang-Undang Perbankan Syariah,¹⁸ dan Undang-Undang Zakat.¹⁹ mengatur pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Penerapan hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia ini mencerminkan keragaman dan dinamika hukum di negara tersebut, serta upaya untuk mengakomodasi aspirasi dan nilai-nilai keagamaan dalam kerangka hukum nasional.

Sejarah hukum Islam di Indonesia menunjukkan perjalanan yang panjang dan dinamis, mulai dari masuknya Islam melalui perdagangan hingga pengakuan dan penerapan dalam sistem hukum nasional. Hukum Islam telah berinteraksi dengan hukum adat dan hukum Barat, membentuk sistem hukum yang plural dan kompleks di Indonesia. Pengakuan dan penerapan hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan menunjukkan pentingnya nilai-nilai Islam dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim.

2. Sejarah Hukum Barat di Indonesia

Sejarah hukum Barat di Indonesia dimulai pada masa kolonial Belanda, yang membawa sistem hukum Eropa ke Nusantara. Pada abad ke-17, Belanda, melalui Perusahaan Hindia Timur Belanda (VOC), mulai menguasai wilayah-wilayah di Indonesia. Pada masa ini, hukum Belanda mulai diperkenalkan dan

¹⁴ Wike Anggraini and Nella Safira, "Penegakan Syariat Islam Di Kota Banda Aceh – Kinerja Wilayahul Hisbah," *Jurnal Tatapamong* (2019): 75–94.

¹⁵ Ali Geno Berutu, "Penerapan Syariat Islam Aceh Dalam Lintas Sejarah," *Istinbath Jurnal Hukum* 13, no. 2 (2016): 26, <http://www.jstor.org/page/info/about/>.

¹⁶ M. Shohibul Itmam, "Positivisasi Hukum Islam," *STAIN Po PRESS* (2015): 160.

¹⁷ Mohamad Muidul Fitri Atoilah, "Pengaruh Hukum Islam Dalam Aturan Perundang-Undangan Perkawinan," *Al-Hukm* 5, no. 1 (2016): 1–23.

¹⁸ Ayuk Wahdanfiari Adibah, "Studi Analisis Pembentukan Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional," *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2016): 1–20.

¹⁹ Itang and Rehan Hania Azzahra, "Perundang-Undangan Zakat Di Indonesia (Studi Historis Regulasi Tentang Zakat)," *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan* 19, no. 2 (2018): 116–128, <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/1275>.

diterapkan di wilayah-wilayah yang dikuasai. Namun, penerapan hukum Barat secara resmi dan sistematis baru terjadi setelah pemerintah Hindia Belanda mengambil alih kekuasaan dari VOC pada awal abad ke-19. Pada tahun 1848, pemerintah kolonial Belanda memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*), yang secara langsung mengadopsi sistem hukum Eropa.

Penerapan hukum Barat di Indonesia pada masa kolonial dilakukan secara dualistis, di mana hukum Barat diterapkan bagi orang-orang Eropa dan mereka yang diperlakukan sama dengan orang Eropa, sementara hukum adat dan hukum Islam tetap berlaku bagi pribumi.²⁰ Sistem ini menciptakan kompleksitas dan perbedaan perlakuan hukum berdasarkan ras dan status sosial.

Masyarakat pribumi menjalani hukum adat dan hukum Islam yang bervariasi di berbagai wilayah Nusantara. Hukum adat sangat dipengaruhi oleh tradisi dan kebiasaan setempat, sementara hukum Islam diterapkan dalam aspek-aspek tertentu seperti perkawinan, warisan, dan moralitas. Sistem hukum yang dualistis ini tidak hanya menciptakan ketidakadilan hukum tetapi juga memperkuat stratifikasi sosial yang ada. Perbedaan perlakuan hukum ini sering kali menimbulkan konflik dan ketidakpuasan di kalangan pribumi, yang merasa diperlakukan secara tidak adil dan kurang dihargai dalam sistem hukum yang berlaku.

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, banyak undang-undang dan peraturan dari masa kolonial tetap diberlakukan sementara pemerintah Indonesia berupaya mengembangkan sistem hukum nasional yang lebih sesuai dengan nilai-nilai lokal dan kebutuhan masyarakat. Transisi dari hukum kolonial ke hukum nasional ini berlangsung secara bertahap, dengan beberapa

²⁰ Muhammad Noor, "Unifikasi Hukum Perdata Dalam Pluralitas Sistem Hukum Indonesia," *Mazahib* 8, no. 2 (2014): 115–124.

undang-undang kolonial masih menjadi dasar hukum di Indonesia hingga saat ini, meskipun telah mengalami berbagai amandemen dan penyesuaian.²¹

Contohnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini masih merupakan peninggalan dari *Wetboek van Strafrecht Belanda*, yang kemudian disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Meskipun pemerintah Indonesia telah berusaha untuk mengembangkan sistem hukum yang lebih mencerminkan nilai-nilai nasional dan kebutuhan masyarakat, proses transisi ini memerlukan waktu dan sumber daya yang signifikan.²²

Upaya untuk menggantikan undang-undang kolonial dengan undang-undang nasional telah dilakukan secara bertahap. Salah satu contohnya adalah Undang-Undang Agraria tahun 1960 yang menggantikan hukum agraria kolonial²³ dan memberikan hak atas tanah kepada rakyat Indonesia. Selain itu, pada masa Orde Baru, penekanan diberikan pada penyusunan berbagai undang-undang baru di bidang ekonomi dan perdagangan untuk mendukung stabilitas dan pembangunan ekonomi.

Era Reformasi setelah tahun 1998 menandai reformasi hukum yang lebih mendalam, dengan penekanan pada transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum. Meskipun demikian, beberapa undang-undang kolonial, seperti KUHP, masih menjadi dasar hukum di Indonesia hingga saat ini, meskipun telah mengalami berbagai amandemen dan penyesuaian untuk lebih sesuai dengan konteks dan kebutuhan Indonesia modern.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003 merupakan langkah penting dalam memastikan penegakan konstitusi dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Selain itu, desentralisasi kekuasaan melalui otonomi daerah memberikan lebih banyak kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan mereka sendiri, termasuk dalam bidang hukum.

²¹ Djoni Sumardi Gozali, "Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, Dan Hukum Adat)," *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* (2020): 1–195.

²² Gerhard Mangara and Tazqia Aulia Al-Djufri, "Urgensi Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Di Indonesia," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 4 (2022): 269–290.

²³ Slamet Catur Pamungkas, "Transformasi UU Agraria Tahun 1870 Ke UUPA 1960 Pada Masa Dekolonisasi Kepemilikan Tanah Pasca Kemerdekaan Di Indonesia," *Al-Isnad: Journal of Islamic Civilization History and Humanities* 2, no. 2 (2021): 43–59.

Meski demikian, beberapa warisan hukum kolonial, seperti KUHP, masih tetap berlaku dengan berbagai amandemen dan penyesuaian. Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk menggantikan dan memperbarui undang-undang ini agar lebih sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat Indonesia yang terus berkembang.²⁴

3. Sejarah Hukum Adat di Indonesia

Hukum adat adalah sistem hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat adat Indonesia.²⁵ Sebelum kedatangan Islam dan kolonialisme Barat, hukum adat adalah satu-satunya sistem hukum yang berlaku di Nusantara. Hukum adat bersifat tidak tertulis dan sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya, tradisi, dan kebiasaan lokal. Hukum ini bersifat fleksibel dan dinamis, mampu beradaptasi dengan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat.

Hukum adat²⁶ berfungsi sebagai mekanisme pengaturan yang berdasarkan pada kearifan lokal dan tradisi turun-temurun. Hukum ini tidak hanya mengatur hubungan antarindividu dalam masyarakat tetapi juga hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Keberadaan hukum adat mencerminkan adaptasi masyarakat terhadap lingkungan dan kondisi sosialnya, sehingga hukum ini cenderung fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Sebagai sistem hukum yang hidup, hukum adat terus berkembang seiring dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat adat itu sendiri.

Pemerintah kolonial Belanda, melalui kebijakan hukum dualisme, tetap mengakui keberadaan hukum adat,²⁷ terutama untuk masyarakat pribumi. Hukum adat ini diakui melalui konsep "*inlandsche recht*" atau hukum

²⁴ Maroni Maroni, "Problema Penggantian Hukum-Hukum Kolonial Dengan Hukum-Hukum Nasional Sebagai Politik Hukum," *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 1 (2012): 85–96.

²⁵ H Mustaghfirin, "Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, Dan Sistem Hukum Islam, Menuju Sebagai Sistem Hukum Nasional Sebuah Ide Yang Harmoni," *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. Edsus (2011).

²⁶ Aprianti & Kasmawanti, *Hukum Adat Di Indonesia*, Refika Aditama (Bandar Lampung: Pustaka Media, 2020). hal 4-20

²⁷ Sukirno, "Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Dalam Lintasan Waktu," *Diponegoro Private Law Review* 4, no. 3 (2019): 1–18, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/6551>.

pribumi.²⁸Istilah “Hukum Adat” pertama kali dikemukakan oleh. Cristian Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul “*De Acheers*” (Orang-Orang Aceh). Istilah ini kemudian diikuti oleh Mr. Cornelis van Vollenhoven dalam bukunya yang berjudul “*Het Adat Recht van Nederland Indie*”. Sejak diperkenalkan, istilah ini mulai digunakan secara resmi dalam peraturan perundang-undangan Belanda pada akhir tahun 1929.²⁹

Namun, istilah "hukum adat" sebenarnya tidak dikenal dalam masyarakat adat itu sendiri, yang lebih mengenal kata “adat” atau kebiasaan. *Adat recht* yang diterjemahkan menjadi hukum adat sering kali diperdebatkan, apakah dapat dialihkan menjadi "*hukum kebiasaan*". Van Dijk tidak menyetujui istilah "hukum kebiasaan" sebagai terjemahan dari *adat recht* untuk menggantikan istilah hukum adat. Alasan yang dikemukakannya adalah bahwa tidaklah tepat menerjemahkan *adat recht* menjadi hukum kebiasaan karena yang dimaksud dengan hukum kebiasaan adalah aturan-aturan yang terbentuk berdasarkan kebiasaan yang berulang-ulang dan diakui oleh masyarakat sebagai sesuatu yang wajib ditaati. Hukum adat, di sisi lain, mencakup lebih dari sekedar kebiasaan; ia juga mencakup norma-norma, nilai-nilai, dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun dan diakui secara resmi sebagai aturan yang mengikat dalam masyarakat adat.

Setelah Indonesia merdeka, hukum adat diakui sebagai salah satu sumber hukum nasional. UUD 1945, dalam Pasal 18B, mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal ini menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.³⁰

²⁸ Munir Salim, “Adat Recht Sebagai Bukti Sejarah Dalam Perkembangan Hukum Postif Di Indonesia,” *Jurnal Al Daulah* Volume 4 N, no. 1 (2022): 16–31.

²⁹ Erman and Afdhal Rinaldi, “Kerukunan Dan Kearifan Lokal Dalam Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Kampar,” *Toleransi: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama* (Riau: Toleransi Media Komunikasi Umat Beragama, 2012). hal 2013

³⁰ Aris Adiando, Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat terhadap perolehan hak atas tanah Adat,” *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2020): 1–21.

Selain itu, negara juga mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Pengakuan ini mencerminkan komitmen negara dalam melestarikan dan menghormati keberagaman budaya serta kearifan lokal yang ada di masyarakat.³¹

Berlakunya hukum-hukum lokal yang menyertai kebijakan-kebijakan publik dalam kerangka teologi keagamaan merupakan kearifan mendasar yang harus dijadikan basis kebijakan bagi setiap pengambilan keputusan terkait praktik keagamaan. Hukum adat pada dasarnya merupakan refleksi dari apa yang diyakini masyarakat sebagai pandangan hidup yang sesuai dengan perasaan keadilan dan kepatutan. Sebagai tradisi hukum, adat istiadat berfungsi sebagai pedoman orientasi dalam bertindak dan berperilaku yang dipandang benar dalam kehidupan masyarakat, baik dalam hubungannya dengan orang lain maupun dengan alam sekitarnya. Dengan demikian, hukum adat tidak hanya menjadi instrumen hukum tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.³²

B. Hubungan Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Tata Hukum di Indonesia

Hubungan antara Hukum Adat dan Hukum Islam dalam tata hukum di Indonesia adalah salah satu aspek penting yang mencerminkan pluralisme hukum di negara ini.³³ Kedua sistem hukum ini berkontribusi dalam pembentukan dan pengembangan hukum nasional Indonesia. Hukum adat dan hukum Islam sering kali berinteraksi dan saling melengkapi dalam praktik sehari-hari. Di banyak daerah, hukum adat mengatur urusan-urusan lokal yang bersifat non-religius, seperti masalah tanah, warisan, dan hubungan sosial.

³¹ Titis Anindyajati, "Politik Hukum Tentang Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Melindungi Eksistensi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia," *Jurnal Masyarakat dan Budaya* 19, no. 1 (2017): 1.

³² Hendra Wahanu Prabandani, "Pembangunan Hukum Berbasis Kearifan Lokal," *Biro Hukum, Bappenas* 01 (2011): 29–33

³³ Murdan, "Pluralisme Hukum (Adat Dan Islam) Di Indonesia," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 1 (2016): 48–60.

Sementara itu, hukum Islam biasanya diterapkan dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan agama, seperti perkawinan, perceraian, dan warisan bagi umat Islam. Dalam beberapa kasus, hukum adat dan hukum Islam dapat berinteraksi secara harmonis, namun ada pula situasi di mana terjadi ketegangan atau konflik antara keduanya, terutama ketika ada perbedaan prinsip atau interpretasi.³⁴

Peran penting dari hukum adat dan hukum Islam juga diakui dalam sistem hukum nasional Indonesia. Konstitusi Indonesia, melalui Pasal 18B dan Pasal 28I, mengakui dan menghormati keberadaan hukum adat dan hak-hak masyarakat adat. Selain itu, sistem peradilan agama di Indonesia, yang diatur oleh Undang-Undang Peradilan Agama, memberikan yurisdiksi khusus bagi pengadilan agama untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum Islam bagi umat Islam. Kedua sistem ini diintegrasikan ke dalam hukum nasional melalui berbagai undang-undang dan peraturan, mencerminkan upaya untuk mengakomodasi keberagaman hukum dan budaya di Indonesia.

Integrasi antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional mencerminkan upaya untuk menciptakan sistem hukum yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan serta nilai-nilai masyarakat Indonesia. Meskipun demikian, tantangan dalam mengharmonisasikan ketiga sistem hukum ini tetap ada, terutama dalam memastikan bahwa semua sistem hukum tersebut berjalan dengan adil dan konsisten dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan demokrasi. Upaya berkelanjutan diperlukan untuk mengembangkan kerangka hukum yang mampu mengakomodasi pluralisme hukum, sambil tetap menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan bagi seluruh warga negara.³⁵

Meskipun pada awalnya kedatangan Belanda tidak ada kaitannya dengan agama, namun pada perkembangannya demi Kepentingan penjajah tidak bisa dihindari pergesekan dengan masalah hukum pribumi. Dengan berlakunya hukum adat bagi bangsa Indonesia dan hukum agama bagi pemeluknya muncul

³⁴ Maroni, "Problema Penggantian Hukum-Hukum Kolonial Dengan Hukum-Hukum Nasional Sebagai Politik Hukum."

³⁵ Veisa Najwa Tionika, Rizka Ayu Mardiana, and Najwa Mufidah Hasibuan, "Integrasi Konsep Hukum Adat Dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional Indonesia," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 1, no. 9 (2023): 21–30.

beberapa teori seperti; *Teori Receptie in Complexu*, *Receptie*, *Receptie Exit*, *Receptie A Contra Rio* dan *Eksistensi*.

1). *Teori Receptie in Complexu*:

Teori receptio in complexu adalah sebuah konsep dalam ilmu hukum yang mengacu pada penerimaan hukum agama (terutama hukum Islam) secara keseluruhan oleh masyarakat yang memeluk agama tersebut. Teori ini berpendapat bahwa masyarakat yang menganut agama tertentu akan menerima tidak hanya ajaran agama itu sendiri, tetapi juga hukum yang ada dalam agama tersebut, dan hukum agama ini akan menjadi bagian dari sistem hukum yang berlaku di masyarakat tersebut.³⁶

Secara lebih khusus, teori *receptio in complexu* menyatakan bahwa hukum adat yang berlaku dalam suatu masyarakat yang menganut agama akan disesuaikan atau bahkan diterima dalam bentuk yang sesuai dengan hukum agama yang dianut. Dalam konteks Islam, misalnya, hukum adat yang berlaku dalam masyarakat adat akan mengikuti prinsip-prinsip hukum Islam selama tidak bertentangan dengan ajaran agama tersebut.³⁷

Di Indonesia, teori ini sering dikaitkan dengan hubungan antara hukum adat dan hukum Islam dalam masyarakat Muslim. Meskipun Indonesia memiliki sistem hukum negara yang terpisah, masyarakat adat yang memeluk Islam masih menerapkan hukum Islam dalam banyak aspek kehidupan mereka, baik dalam hal pernikahan, warisan, atau penyelesaian sengketa.

Sebagai contoh, hukum warisan dalam Islam mengatur pembagian harta warisan berdasarkan prinsip hukum Islam, yang mungkin berbeda dengan sistem hukum adat yang berlaku di masyarakat tertentu. Dalam hal ini, teori *receptio in complexu* menyarankan bahwa hukum adat dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.³⁸

³⁶ Nurjannah, "Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia," *Asas* 4, no. 2 (2012): 2.

³⁷ Edi Gunawan, "Pengaruh Teori Berlakunya Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peradilan Agama Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 15, no. 2 (2017): 74–93.

³⁸ H. Ichtijanto S.A, "Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam Di Indonesia," *Hukum Islam di Indonesia, Perkembangan dan Pembentukan* 0 (1991): 72–75.

Namun, di sisi lain, meskipun hukum negara Indonesia mengatur berbagai aspek kehidupan, hukum Islam dan hukum adat masih sering diterapkan dalam ranah tertentu, seperti dalam hukum keluarga atau permasalahan yang bersifat lokal dan kultural.

Teori *receptio in complexu* menekankan integrasi antara hukum agama dan hukum adat. Teori ini memungkinkan adanya adaptasi antara dua sistem hukum tersebut selama tidak saling bertentangan. Penerimaan hukum agama secara keseluruhan oleh masyarakat yang menganut agama tersebut menciptakan keselarasan antara ajaran agama dan praktik hukum dalam masyarakat, dengan mempertimbangkan nilai-nilai adat setempat.

2). *Teori Receptie*:

Teori ini diperkenalkan oleh *C. Snouck Hurgronje*. Menurut teori ini, hukum Islam hanya berlaku jika telah diterima (*receptie*) oleh hukum adat. Artinya, hukum adat menjadi filter atau penyaring sebelum hukum Islam dapat diterapkan.

*Teori Receptie*³⁹ menempatkan hukum adat sebagai sistem hukum utama yang berlaku di masyarakat Indonesia. Hukum Islam hanya dapat diterapkan jika telah melalui proses penerimaan dan pengesahan oleh hukum adat. Menurut teori ini, hukum Islam harus disesuaikan dengan norma-norma dan nilai-nilai hukum adat setempat sebelum dapat diakui dan diterapkan. Ini berarti bahwa hukum adat memiliki otoritas untuk menentukan sejauh mana hukum Islam dapat diterapkan

Teori ini juga mencerminkan upaya pemerintah kolonial Belanda untuk mengendalikan dan mengatur penerapan hukum Islam di Indonesia. Dengan menempatkan hukum adat sebagai filter, pemerintah kolonial berusaha mengurangi pengaruh hukum Islam yang dianggap bisa mengancam stabilitas pemerintahan kolonial.⁴⁰ *Teori Receptie* memperhitungkan adanya variasi budaya dan sosial di berbagai daerah di Indonesia. Karena hukum adat

³⁹ Zaelani, "Kebijakan Pemerintahan Kolonial, Teori Receptie In," *Komunike* XI, no. 1 (2019): 130.

⁴⁰ Zaelani, "Hukum Islam Di Indonesia Pada Masa Penjajahan Belanda: Kebijakan Pemerintahan Kolonial, Teori Receptie in Complexu, Teori Receptie Dan Teori Teceptio a Contrario Atau Teori Receptio Exit," *Komunike* 11, no. 1 (2020): 128–163.

berbeda-beda di setiap daerah, penerimaan hukum Islam juga dapat bervariasi sesuai dengan konteks lokal.

Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa teori ini tidak sepenuhnya mengakui kompleksitas dan pluralisme hukum di Indonesia. *Teori Receptie* dianggap tidak memberikan ruang yang cukup bagi hukum Islam untuk berkembang sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang pluralistic

3). *Teori Receptie a Contra Rio*

Teori ini juga merupakan kritik terhadap teori Receptie.⁴¹ Dikemukakan oleh Soepomo, teori ini menekankan bahwa hukum Islam telah berlaku secara independen dan tidak tergantung pada penerimaan oleh hukum adat. Teori Receptie Exit, yang diperkenalkan oleh Hazairin, merupakan reaksi terhadap teori Receptie yang dikemukakan oleh C. Snouck Hurgronje. Teori ini menyatakan bahwa hukum Islam secara langsung berlaku bagi umat Islam di Indonesia tanpa perlu melalui penerimaan oleh hukum adat. Teori Receptie a Contra Rio, yang dikemukakan oleh Soepomo, merupakan kritik terhadap teori Receptie yang menyatakan bahwa hukum Islam hanya berlaku jika telah diterima oleh hukum adat. Soepomo menekankan bahwa hukum Islam telah berlaku secara independen dan tidak tergantung pada penerimaan oleh hukum adat. Menurut teori ini, hukum Islam memiliki kedudukan yang mandiri dan dapat diterapkan langsung bagi umat Islam di Indonesia tanpa perlu disaring atau diterima oleh hukum adat terlebih dahulu.⁴²

Demikian juga, Teori Receptie Exit, yang diperkenalkan oleh Hazairin, merupakan reaksi terhadap teori Receptie yang dikemukakan oleh C. Snouck Hurgronje. Hazairin menegaskan bahwa hukum Islam secara langsung berlaku bagi umat Islam di Indonesia tanpa perlu melalui penerimaan oleh hukum adat. Kedua teori ini, baik Teori Receptie a Contra Rio maupun Teori Receptie Exit, sama-sama menolak pandangan bahwa hukum Islam harus melalui filter hukum adat dan menekankan kemandirian serta penerapan langsung hukum Islam bagi umat Islam di Indonesia.

⁴¹ Gunawan, "Pengaruh Teori Berlakunya Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peradilan Agama Di Indonesia."

⁴² Nurjannah, "Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia."

4). *Teori Receptie Exit*

Teori ini merupakan reaksi terhadap *teori Receptie*.⁴³ Diperkenalkan oleh Hazairin, teori ini menyatakan bahwa hukum Islam secara langsung berlaku bagi umat Islam di Indonesia tanpa perlu melalui penerimaan oleh hukum adat. Teori *Receptie Exit*⁴⁴ menegaskan bahwa hukum Islam memiliki kedudukan yang mandiri dan independen. Menurut teori ini, hukum Islam dapat diterapkan langsung bagi umat Islam tanpa harus disaring atau diterima oleh hukum adat terlebih dahulu. Hazairin menolak pandangan bahwa hukum Islam harus melalui filter hukum adat, sebagaimana diusulkan dalam teori *Receptie*. Sebaliknya, ia mengakui hak umat Islam untuk menerapkan hukum Islam secara langsung, mencerminkan bahwa hukum Islam adalah bagian integral dari identitas dan kehidupan umat Islam di Indonesia.

Teori ini juga mencerminkan semangat reformasi hukum di Indonesia, di mana hukum Islam diberikan ruang untuk berkembang dan diakui sebagai salah satu pilar dalam sistem hukum nasional. Dengan mengakui dan menegaskan penerapan langsung hukum Islam, teori *Receptie Exit* memberikan dorongan bagi pengakuan dan penerapan hukum Islam dalam kerangka hukum nasional.

Namun, beberapa kritik terhadap teori ini mencakup pandangan bahwa teori *Receptie Exit* mengabaikan kenyataan pluralisme hukum di Indonesia. Penerapan hukum Islam secara langsung tanpa mempertimbangkan hukum adat dapat menimbulkan konflik hukum di masyarakat yang memiliki keberagaman sistem hukum. Selain itu, implementasi hukum Islam tanpa penerimaan hukum adat dapat menghadapi tantangan praktis dalam pelaksanaannya, terutama di daerah-daerah di mana hukum adat masih sangat kuat dan dominan. Tantangan sosial juga muncul dalam penerapannya di masyarakat yang multikultural dan multiagama, di mana penerapan langsung hukum Islam mungkin tidak selalu selaras dengan norma dan nilai setempat.

⁴³ Anis Masykhur, "Blessing in Disguise Teori Receptie: Dampak Teori Receptie Pada Tradisi Penyalinan Dan Penulisan Ulang Manuskrip Hukum Adat Dan Undang-Undang Kerajaan Islam Nusantara," *Istinbath* 19, no. 2 (2021): 238–265.

⁴⁴ Nurjannah, "Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia."

Dengan demikian, meskipun Teori Receptie Exit membawa dampak signifikan dalam perdebatan hukum di Indonesia dan mendorong pengakuan hukum Islam, penerapannya harus mempertimbangkan konteks sosial dan budaya yang ada serta pentingnya menjaga keseimbangan antara berbagai sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

5). *Teori Eksistensi*

Teori ini menegaskan bahwa hukum Islam dan hukum adat masing-masing memiliki eksistensi yang independen dan berlaku di Indonesia. Keduanya tidak saling menggantikan tetapi berjalan bersamaan dengan hukum nasional yang berlaku.⁴⁵

Perkembangan teori-teori ini menunjukkan bagaimana dinamika hubungan antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum kolonial Belanda di Indonesia. Pergesekan dan interaksi antara ketiga sistem hukum ini mencerminkan upaya masyarakat dan pemerintah kolonial untuk menavigasi kompleksitas hukum di Indonesia pada masa penjajahan dan setelahnya.

C. **Pluralisme Hukum di Indonesia**

Pluralisme hukum di Indonesia, meskipun diakui sebagai upaya untuk mengatasi kekurangan sistem hukum nasional yang sentralistik, menghadapi beberapa kritik dan permasalahan.⁴⁶ Meskipun Undang-Undang Agraria mengakui hak masyarakat hukum adat dan tanah ulayat, penerapannya sering kali tidak konsisten di lapangan. Otonomi daerah yang seharusnya memfasilitasi pengakuan lebih lanjut terhadap keberagaman hukum lokal, seperti perda syariah dan qanun, juga menimbulkan kontroversi terkait konsistensi dengan hukum nasional serta prinsip-prinsip HAM. Pembentukan lembaga-lembaga adat sebagai penyelesaian sengketa adat juga terkadang mengalami kendala dalam pengakuan dan otoritas keputusan mereka oleh lembaga formal negara

⁴⁵ Muh. Haras Rasyid, "Teori Eksistensi Dan Eksistensinya Terhadap Peluang Dan Tantangan Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia," *Pendidikan Dan Studi Islam* 149 2 (2018): 1.

⁴⁶ Fradhana Putra Disantara, "Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia Sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum," *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 6, no. 1 (2021): 1–36.

Sekilas, situasi ini dapat diapresiasi sebagai terobosan dalam pembaruan hukum dan upaya untuk mengakomodasi keragaman normatif yang ada di masyarakat. Namun, dalam praktiknya, pluralisme⁴⁷ hukum di Indonesia menghadapi berbagai permasalahan yang menimbulkan dilema dan melemahkan keberadaan pluralisme hukum. Salah satu masalah utama adalah ketergantungan hukum adat pada pengakuan dari hukum negara. Hukum adat yang diakui seringkali merupakan konstruksi dari hukum negara, sehingga kehilangan sifatnya sebagai hukum yang hidup dan dipercayai oleh masyarakat.

Kondisi ini juga berlaku pada lembaga adat, dimana keputusan dari lembaga adat seringkali tidak diakui atau diabaikan oleh lembaga peradilan formal, sehingga lembaga adat tidak memiliki kapasitas eksekusi yang setara dengan institusi peradilan. Di sisi lain, perda syariah di beberapa daerah memicu penolakan keras dari masyarakat setempat karena bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang lebih tinggi dalam hierarki hukum dan dianggap melanggar hak asasi manusia (HAM).

D. Tantangan dan Konflik Integrasi dalam Sistem Hukum Nasional

Integrasi hukum adat dan hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan yang perlu diatasi untuk mencapai harmonisasi yang efektif. Salah satu tantangan utama adalah potensi konflik antara hukum adat atau hukum Islam dengan hukum nasional yang berbasis *civil law*. Misalnya, ketika praktik-praktik adat terkait dengan tanah atau warisan bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria, atau ketika ketentuan hukum Islam dalam masalah perkawinan atau warisan tidak sejalan dengan hukum sipil nasional. Konflik semacam ini dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum dan perlakuan yang berbeda di berbagai wilayah.⁴⁸

Selain itu, integrasi hukum adat dan hukum Islam juga harus memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi

⁴⁷ Wandi Subroto, "Pluralisme Hukum Sebagai Model Pembangunan Hukum," *Akselerasi : Jurnal Ilmiah Nasional* 4, no. 1 (2022): 8–15.

⁴⁸ Ratni Kasmad, "Peluang Dan Tantangan Integrasi Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional," *MADDIKA : Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2021): 26–37.

dan hukum internasional. Terkadang, praktik-praktik adat atau ketentuan hukum Islam bisa bertentangan dengan hak-hak yang diakui secara universal, seperti kesetaraan gender atau kebebasan beragama.

Untuk mengatasi konflik-konflik tersebut, penting dilakukan upaya harmonisasi dan mediasi antara berbagai sistem hukum. Pendekatan ini dapat melibatkan dialog yang inklusif dan musyawarah antara berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat lokal,⁴⁹ pemimpin adat, ulama, serta aparat hukum dan pemerintah daerah. Tujuannya adalah mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak, sambil mempertimbangkan nilai-nilai dan kepentingan yang ada di masyarakat.

Penguatan kapasitas dan edukasi mengenai hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional juga penting untuk dilakukan.⁵⁰ Hal ini membantu dalam memahami kompleksitas integrasi hukum serta mengurangi kesalahpahaman atau penafsiran yang tidak tepat dalam penerapan hukum di lapangan. Dengan pendekatan yang inklusif dan berbasis dialog serta penguatan kapasitas, Indonesia dapat memperkuat sistem hukum nasionalnya dengan menghormati keberagaman budaya dan agama, sambil menjaga keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh warganya.

E. Hukum Pidana di Indonesia

Hukum pidana adalah cabang hukum yang mengatur tentang tindak pidana dan hukuman yang dapat dijatuhkan atas pelanggaran tersebut.⁵¹ Kata "hukum pidana" sering digunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan yang mengatur syarat-syarat dan prosedur yang harus dipenuhi oleh negara ketika negara ingin menerapkan hukum pidana. Ini termasuk aturan-aturan yang merumuskan jenis-jenis pidana yang dapat diberikan. Dalam pengertian ini, hukum pidana merujuk pada hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif, yang mencakup beberapa aspek utama;

⁴⁹ Herlina Astri, "Penyelesaian Konflik Sosial Melalui Penguatan Kearifan Lokal," *Jurnal Aspirasi* 2, no. 2 (2011): 151–162, <http://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/439>.

⁵⁰ Kurnia Ali Syarif and Dyan Paramitha Darmayanti, "Masa Depan Hukum Adat Di Indonesia," *Jurnal Sains dan Teknologi* 5, no. 2 (2023): 648–652.

⁵¹ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Perpustakaan Nasional (Ciputat Timur: Nusantara Persada Utama, 2017). hal 1

- 1) *Perumusan Delik*: Ketentuan yang menetapkan perbuatan apa saja yang dianggap sebagai tindak pidana dan oleh karena itu dapat dikenakan hukuman.
- 2) *Syarat-Syarat Pemberian Pidana*: Aturan yang mengatur bagaimana dan kapan hukuman dapat dijatuhkan.
- 3) *Jenis-Jenis Pidana*: Ketentuan yang merumuskan berbagai bentuk hukuman yang dapat diberikan, seperti penjara, denda, kerja sosial, dan lain-lain. Dalam konteks ini, hukum pidana tidak hanya mencakup hukum substantif yang mengatur tentang tindak pidana dan hukuman, tetapi juga prosedur hukum pidana yang mengatur tentang proses penegakan hukum pidana, mulai dari penyelidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan hukuman

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia mengatur jenis-jenis pidana yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pasal 10 KUHP menjelaskan secara rinci jenis pidana tersebut.⁵² Pidana pokok terdiri dari beberapa jenis. *Pertama*, pidana mati, yang diberikan untuk kejahatan-kejahatan tertentu yang dianggap sangat berat. *Kedua*, pidana penjara, yang dapat diberikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan beratnya kejahatan yang dilakukan.

Ketiga, pidana kurungan, yang biasanya diberikan untuk pelanggaran-pelanggaran yang tidak terlalu berat, dengan jangka waktu yang lebih pendek dibandingkan pidana penjara. *Keempat*, pidana denda, yang merupakan hukuman yang mengharuskan terpidana membayar sejumlah uang kepada negara.⁵³

Pidana tambahan juga terdiri dari beberapa jenis. *Pertama*, perampasan barang-barang tertentu, yang mengharuskan terpidana menyerahkan barang-barang tertentu yang berhubungan dengan kejahatan kepada negara. *Kedua*, pencabutan hak-hak tertentu, di mana terpidana dapat kehilangan hak-hak

⁵² Devega R Kilanta, "Lex Crimen," *Devega R Kilanta* VI, no. 3 (2017): 94–102, <https://e-resources.perpusnas.go.id:2089/id/publications/148575/penegakan-hukum-terhadap-hak-cipta-berdasarkan-undang-undang-nomor-28-tahun-2014>.

⁵³ Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori Dan Praktek,"* vol. Vol. 1, 2019.

tertentu, seperti hak untuk menjalankan profesi tertentu atau hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. *Ketiga*, pengumuman putusan hakim, di mana putusan hakim dapat diumumkan kepada publik sebagai bagian dari hukuman untuk memberikan efek jera dan menginformasikan masyarakat.

Beberapa negara telah menghapuskan hukuman mati karena berbagai alasan, termasuk pertimbangan etis, moral, dan hak asasi manusia. Di Indonesia, hukuman mati masih ada dalam sistem hukum, tetapi penerapannya sering kali menjadi perdebatan dan kritik dari berbagai pihak, termasuk organisasi hak asasi manusia.

Ada beberapa alasan mengapa pidana mati dihapuskan. *Pertama*, pidana mati dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia. *Kedua*, orang yang dijatuhkan pidana mati pada kenyataannya menjalankan dua jenis pidana sekaligus yakni pidana penjara dan pidana mati. Hal ini karena dalam masa penantian pelaksanaan pidana mati, si terpidana mendekam dalam penjara. *Ketiga*, jika ada kesalahan dalam penjatuhan pidana mati dan si terpidana sudah dieksekusi maka tidak mungkin lagi untuk memperbaiki kesalahan tersebut.

Ada beberapa negara yang sampai saat ini belum menghapuskan pidana mati – termasuk Indonesia – memiliki argumen: *Pertama*, tidak ada satu ajaran agama pun yang mengharamkan penjatuhan pidana mati. *Kedua*, dalam doktrin pidana, jika kejahatan yang dilakukan memiliki dampak yang luar biasa dan tidak ada peluang untuk memperbaiki pelaku maka pidana mati dapat dijatuhkan untuk menyingkapkan pelaku. *Ketiga*, pidana mati berfungsi sebagai *general preventie* atau pencegahan umum terjadinya kejahatan.

Pidana penjara secara garis besar dibagi menjadi pidana penjara sementara waktu dan pidana penjara seumur hidup. Pidana penjara sementara waktu minimal adalah 1 hari dan maksimal 20 tahun penjara. Pidana penjara seumur hidup berarti seorang yang dijatuhi pidana tersebut mendekam dalam penjara sampai meninggal dunia. Pidana kurungan dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana dengan kualifikasi pelanggaran. Minimal pidana

kurungan adalah 1 hari dan maksimal pidana kurungan adalah 1 tahun. Pidana denda berarti kepada terpidana diharuskan membayar sejumlah uang tertentu.⁵⁴

Secara singkat, Moeljatno⁵⁵ memberi pengertian hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.

Pengertian ini menekankan bahwa hukum pidana merupakan bagian integral dari sistem hukum suatu negara yang bertujuan untuk mengatur dan mengontrol perilaku masyarakat melalui penetapan perbuatan-perbuatan yang dilarang serta memberikan ancaman pidana bagi pelanggarnya. Ini mencerminkan fungsi preventif dan represif dari hukum pidana, yaitu mencegah tindak pidana melalui larangan dan sanksi, serta menindak pelanggaran untuk menjaga ketertiban dan keadilan sosial. Hukum pidana juga menentukan secara jelas kapan dan dalam kondisi apa sanksi pidana dapat dikenakan, serta prosedur pelaksanaannya, sehingga memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak individu dalam proses penegakan hukum. Analisis ini menunjukkan pentingnya hukum pidana dalam menjaga tatanan sosial dan memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara adil dan teratur.

Menurut Sudarsono,⁵⁶ hukum pidana merupakan hal yang mengatur tentang pelanggaran serta kejahatan terhadap kepentingan umum dan perbuatan itu diancam dengan hukuman pidana yang merupakan suatu penderitaan.

Dari penjelasan ini, bahwa hukum pidana berfungsi untuk melindungi kepentingan umum dengan menetapkan sanksi yang menimbulkan penderitaan bagi pelanggar hukum. Tujuan dari sanksi ini adalah untuk menegakkan ketertiban, keamanan, dan keadilan di masyarakat. Dengan mengancam pelaku

⁵⁴ Ketut Mertha, "Buku Ajar Hukum Pidana," *Buku Ajar Hukum Pidana Universitas Udayana* (2016): 313.

⁵⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Ke.8 (Jakarta: Jakarta, 2008). hal 1

⁵⁶ Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007).

kejahatan dengan hukuman, hukum pidana bertujuan untuk mencegah tindak kejahatan dan memastikan bahwa pelanggaran terhadap kepentingan umum ditindak tegas. Ini juga mencerminkan sifat represif hukum pidana yang menekankan pada pengendalian dan penindakan terhadap perilaku yang merugikan masyarakat luas.

Menurut Satochid Kartanegara, Hukum Pidana adalah sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif suatu negara. Peraturan-peraturan ini mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan pidana. Larangan atau keharusan ini disertai dengan ancaman pidana. Jika seseorang melanggar larangan atau keharusan tersebut, negara memiliki hak untuk melakukan tuntutan hukum, menjalankan atau melaksanakan pidana sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.⁵⁷

Dengan demikian, hukum pidana berfungsi untuk menegakkan ketaatan terhadap norma-norma yang diatur oleh negara demi menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

1. Pembagian Hukum Pidana

Hukum Pidana dapat dibagi menjadi beberapa bagian⁵⁸ utama berdasarkan cakupan dan fungsinya dalam sistem hukum suatu negara. Berikut adalah pembagiannya secara umum:

- a) *Hukum Pidana Materiil*: Bagian dari hukum pidana yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang (delik) dan sanksi pidana yang diancamkan terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut. Ini mencakup definisi tindak pidana, unsur-unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan seseorang bersalah, serta hukuman yang dapat dijatuhkan.
- b) *Hukum Pidana Formil*: Merupakan bagian dari hukum pidana yang mengatur prosedur-prosedur yang harus diikuti dalam penegakan hukum pidana, termasuk proses penyelidikan, penuntutan, persidangan,

⁵⁷ Takdir., "Mengenal Hukum Pidana," *Laskar Perubahan* (2013): 1–136.

⁵⁸ Eddy O.S. Hiarij, "Definisi Hukum Pidana, Pembagian Hukum Pidana & Definisi, Objek, Dan Tujuan Ilmu Hukum Pidana," *Modul 1* (2009): 1–48.

dan pelaksanaan pidana. Hukum pidana formil ini mencakup prinsip-prinsip yang menjamin perlindungan hak-hak terdakwa dan memastikan keadilan dalam proses peradilan pidana.

- c) *Hukum Pidana Khusus*: Merupakan bagian dari hukum pidana yang mengatur tentang jenis-jenis kejahatan atau pelanggaran tertentu yang spesifik, seperti kejahatan narkoba, kejahatan korupsi, kejahatan lingkungan, dan sebagainya. Hukum pidana khusus ini menetapkan norma-norma yang berlaku secara khusus untuk jenis kejahatan tersebut.
- d) *Hukum Pidana Umum*: Merupakan bagian dari hukum pidana yang mengatur tentang delik-delik yang umum diakui sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai atau norma-norma masyarakat secara luas, seperti pencurian, pembunuhan, penganiayaan, dan sebagainya. Hukum pidana umum ini mencakup prinsip-prinsip yang bersifat umum dan berlaku untuk kejahatan-kejahatan yang umum dilakukan.

Pembagian ini membantu dalam memahami struktur dan fungsi hukum pidana dalam sistem hukum suatu negara, serta bagaimana hukum pidana berperan dalam menegakkan ketaatan terhadap norma-norma yang diatur untuk menjaga ketertiban dan keadilan sosial.

2. Tujuan Hukum Pidana

Tujuan utama dari hukum pidana⁵⁹ adalah untuk mencapai beberapa hal yang penting dalam sebuah masyarakat. Berikut adalah tujuan-tujuan utama dari hukum pidana:

1. *Pencegahan dan Perlindungan*: Hukum pidana bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana dengan menetapkan larangan-larangan yang jelas dan mengancam dengan sanksi pidana bagi pelanggar. Ini membantu

⁵⁹ Nafi' Mubarak, "Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Fiqh Jinayah," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 18, no. 2 (2015): 296–323, <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/view/233>.

dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat serta melindungi warga dari bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh tindakan kriminal.⁶⁰

2. *Penegakan Keadilan*: Hukum pidana berperan dalam menegakkan keadilan dengan memberikan respons yang sesuai terhadap pelanggaran terhadap nilai-nilai masyarakat dan norma hukum. Melalui proses pengadilan yang adil dan objektif, hukum pidana memastikan bahwa setiap individu memiliki hak untuk diproses sesuai dengan aturan yang berlaku dan memperoleh keadilan yang layak.
3. *Pemulihan dan Rehabilitasi*: Selain memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan, hukum pidana juga berusaha untuk memulihkan mereka ke dalam masyarakat dan mencegah kejahatan yang akan datang. Ini dapat mencakup program-program rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan pemberian kesempatan kedua bagi pelaku kejahatan untuk memperbaiki perilaku mereka.
4. *Pencegahan Umum*: Selain pencegahan spesifik terhadap tindak pidana, hukum pidana juga berfungsi sebagai alat untuk mencegah terjadinya kejahatan secara umum dalam masyarakat. Dengan menunjukkan konsekuensi dari perilaku kriminal, hukum pidana berperan dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan membatasi insentif untuk melanggar hukum.

Dengan tujuan-tujuan ini, hukum pidana menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga stabilitas sosial dan keadilan di dalam suatu negara.

F. Restorative Justice dalam Sistem hukum di Indonesia

Sistem Hukum Pidana Indonesia juga memasuki babak baru, satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif (*restorative justice*).

⁶⁰ Noveria Devy Irmawanti and Barda Nawawi Arief, "Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pidana Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pidana Hukum Pidana," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 2 (2021): 217–227.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan POLRI nomor 8 tahun 2021⁶¹ dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif⁶². Keadilan restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana⁶³ berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, dan pihak lain terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat⁶⁴

Eva Achyani Zulfa⁶⁵ mengatakan bahwa akar keadilan *restoratif* ditemukan dalam hukum adat, seperti: corak religius yang menempatkan hukum adat sebagai bentuk kesatuan batin masyarakat dalam satu kesatuan (komunal); dan sifat komunal hukum adat menempatkan individu sebagai orang yang terikat dengan masyarakat.

Restoratif justice adalah pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan yang terganggu akibat kejahatan, bukan hanya pada hukuman atau pembalasan semata. Pendekatan ini berfokus pada memperbaiki kerugian yang dialami korban, memperbaiki hubungan antara pelaku kejahatan dan korban, serta memperbaiki keadaan masyarakat yang terpengaruh oleh kejahatan.⁶⁶

— Pendekatan *restoratif justice* mengutamakan dialog, partisipasi, dan akuntabilitas. Melalui berbagai mekanisme seperti konferensi restoratif, mediasi, atau program rehabilitasi, pelaku kejahatan, korban, dan pihak-pihak

⁶¹ Lihat; <https://reskrimum.metro.polri.go.id/wp-content/uploads/2022/01/PERPOL-No-8-Th-2021-Penanganan-Tindak-Pidana-Berdasarkan-Keadilan-Restoratif.pdf>

⁶² Lihat https://jdih.go.id/files/760/berkas_4150.pdf

⁶³ Abdul Rahman bin Naseeb, *Al-Adalah At-Tasolihiah Al-Badilil 'Adalah Al-jana'iyah* Majalah Al-Fikr, [S.l], n.11, maret 2018. ISSN 1112-8623. -Jami;ah Mohammed Kheidar - Biskra – Al –Jazair DOI: <https://doi.org/10.26389/AJSRP.K220421>

⁶⁴ Shannen Sana, *Al-Adalah At-Tasolihiah Wa asaruha 'alal Al-Adalah Al-jana'iyah Fi Tasyri' Al –Jazairi* Majalah Al-'Ulum al-Qonuniyah Wa Syiasah, Volume 11, Numéro 3, Pages 508-531 2020-12-28

⁶⁵ Zulfa, E. A. Keadilan Restoratif. Jakarta: Badan penerbit FH U (2009).

⁶⁶ Amabarsari Hanafi arif, "Penerapan Restorasi Justise Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Penerapan Restorasi Justise Dalam Hukum Pidana* 53, no. 9 (2013): 1689–1699.

terkait lainnya diberi kesempatan untuk berinteraksi, memahami dampak kejahatan, dan bekerja sama dalam mencari solusi yang memadai.

Tujuan dari *restoratif justice* adalah tidak hanya memulihkan kerugian yang disebabkan oleh kejahatan, tetapi juga memperkuat kembali kepercayaan antara individu dalam masyarakat, mengurangi tingkat pengulangan kejahatan, serta mempromosikan kedamaian dan keadilan yang lebih baik secara keseluruhan. Prinsip-prinsip *restoratif justice* meliputi:

- a) Pemulihan (*Restoration*): Menekankan pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh kejahatan, baik secara materiil maupun emosional, kepada korban dan masyarakat.
- b) Rekonsiliasi (*Reconciliation*): Memfasilitasi dialog dan interaksi antara pelaku kejahatan dan korban untuk memperbaiki hubungan, mempromosikan empati, dan membangun perdamaian.
- c) Partisipasi (*Participation*): Melibatkan semua pihak yang terlibat dalam kejahatan, termasuk pelaku kejahatan, korban, dan masyarakat, dalam proses penyelesaian masalah dan pembuatan keputusan.
- d) Akuntabilitas (*Accountability*): Mengakui tanggung jawab pelaku kejahatan atas tindakannya dan mendorong mereka untuk bertanggung jawab atas perbuatannya serta memperbaiki kesalahan mereka.
- e) Keadilan (*Fairness*): Mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian kasus kejahatan secara adil dan proporsional.

Restoratif justice dapat diimplementasikan melalui berbagai mekanisme, seperti konferensi restoratif, mediasi, rehabilitasi, program kerja bersama, atau pertemuan antara pelaku kejahatan dan korban. Tujuan akhir dari restoratif justice adalah menciptakan lingkungan yang lebih aman, mengurangi tingkat pengulangan kejahatan, dan memperkuat rasa keadilan dalam masyarakat.

G. Restorative Justice Alternatif Baru dalam sistem Pidanaan

Restorative Justice atau keadilan *restoratif* adalah pendekatan baru dalam sistem pidana yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik kriminal dengan fokus pada pemulihan kerugian, rekonsiliasi, dan restorasi hubungan sosial.

Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan tradisional yang lebih berorientasi pada hukuman dan pembalasan.⁶⁷

Restorative Justice berusaha untuk menciptakan proses hukum yang lebih berpusat pada kemanusiaan, kolaborasi, dan keadilan yang holistik. Pendekatan ini sering kali melibatkan pertemuan langsung antara pelaku kejahatan dan korban atau komunitas yang terkena dampak, yang dipandang sebagai kesempatan untuk membangun pemahaman bersama dan mencari solusi yang bermanfaat bagi semua pihak.⁶⁸

Mediasi Penal adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Alternative Dispute Resolution/ADR) yang semakin dikenal di Indonesia, bahkan dalam konteks kasus-kasus pidana tertentu.⁶⁹ Dasar hukum pemberlakuannya di Indonesia dapat ditemukan dalam Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : B/3022/XXI/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009, yang mengatur penanganan kasus-kasus Tindak Pidana Ringan selama proses penyidikan dan penyelesaian.⁷⁰ Beberapa poin utama dari surat kepolisian tersebut antara lain:

1. *Penyelesaian Kasus Pidana Ringan*: Mediasi Penal dapat diterapkan untuk kasus-kasus pidana yang memiliki kerugian materi kecil, seperti yang diatur dalam Pasal 205, 302, 315, 352, 373, 379, 384, 407, dan 482 KUHP.
2. *Persetujuan Para Pihak*: Penyelesaian kasus melalui Mediasi Penal harus disepakati oleh semua pihak yang terlibat dalam kasus. Jika tidak tercapai kesepakatan, kasus harus diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.
3. *Prinsip Musyawarah Mufakat*: Penyelesaian perkara melalui Mediasi Penal harus berdasarkan prinsip musyawarah mufakat antara para pihak yang berkasus.

⁶⁷ Henny Saida Flora, "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Law Pro Justitia* II, no. 2 (2017): 41–60.

⁶⁸ Hanafi arif, "Penerapan Restorasi Justise Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia."

⁶⁹ https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/restorative-justice-alternatif-baru-dalam-sistem-pemidanaan

⁷⁰ Syauqi Mahendra, Nahdhah Nahdhah, and Adwin Tista, "Mediasi Penal Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Jiwa Berdasarkan Keadilan Restoratif," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2022): 459–484.

4. *Penghormatan Terhadap Norma Hukum Sosial/Adat*: Proses Mediasi Penal harus menghormati norma hukum sosial/adat yang berlaku di masyarakat tempat kasus tersebut terjadi, serta memenuhi azas keadilan dalam penyelesaiannya.
5. *Penyelesaian yang Final*: Kasus yang telah diselesaikan melalui Mediasi Penal tidak boleh lagi disentuh oleh tindakan hukum lainnya setelah proses mediasi selesai.⁷¹

Dengan demikian, Mediasi Penal memberikan alternatif yang lebih cepat dan lebih sesuai dengan kebutuhan kasus-kasus pidana ringan, serta mendorong pendekatan yang lebih inklusif dan kolaboratif dalam menyelesaikan konflik hukum di masyarakat.

Sedangkan Restorative Justice (RJ)⁷² di lingkungan Mahkamah Agung RI didasarkan pada beberapa dasar hukum dan peraturan yang mengatur ruang lingkup pelaksanaannya. Berikut adalah dasar hukum utama dan ruang lingkup pelaksanaan RJ di Mahkamah Agung RI.

Restorative Justice (RJ) di lingkungan Mahkamah Agung RI diterapkan khususnya untuk kasus-kasus yang termasuk dalam kategori Tindak Pidana Ringan (Tipiring),⁷³ dengan dasar hukum sebagai berikut:

1. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 310*: Mengatur tentang batasan tindak pidana ringan dan pengenaan denda.
2. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 205*: Memberikan dasar untuk penanganan kasus-kasus pidana ringan dalam proses hukum acara pidana.
3. *Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012*: Menyesuaikan batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda yang berlaku dalam KUHP.
4. *Nota Kesepakatan Bersama*: Antara Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jaksa Agung RI, dan Kepala

⁷¹ Cahya Wulandari, "Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal: Access To Justice Kepolisian," *HUMANI (Hukum dan Masyarakat Madani)* 8, no. 1 (2018): 90–105.

⁷² Erasmus A.T. Napitupulu dkk, *Peluang Dan Tantangan Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Al-Adl: Jurnal Hukum*, vol. 10, 2022.

⁷³ Aflii Unique, "Undang-Undang Mahkamah Agung," no. 0 (2016): 1–23.

Kepolisian Negara RI, yang mengatur mengenai pelaksanaan penyesuaian batasan tindak pidana ringan, pemeriksaan cepat, serta penerapan keadilan restoratif.

5. *Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 301/DJU/HK01/3/2015*: Mengenai penyelesaian tindak pidana ringan dalam konteks keadilan restoratif.
6. *SK Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020*: Pedoman penerapan Restorative Justice di lingkungan peradilan umum, yang mengatur secara lebih rinci mengenai implementasi RJ.

Penerapan RJ pada kasus-kasus Tipiring di Mahkamah Agung RI terfokus pada pasal-pasal tertentu dalam KUHP, seperti Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482, dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000,00 dan bukan merupakan tindak pidana pengulangan. Pendekatan ini bertujuan untuk memfasilitasi proses penyelesaian yang lebih inklusif, memperhatikan kepentingan semua pihak terkait, serta mendukung reintegrasi sosial pelaku ke dalam masyarakat.

H. Agama dan Adat Sebagai Sumber Nilai Restorative Justice di Indonesia

Agama dan adat memainkan peran penting sebagai sumber nilai dalam penerapan restorative justice di Indonesia. Kedua aspek ini memberikan landasan normatif dan moral yang kuat, yang mencerminkan nilai-nilai lokal dan keyakinan religius masyarakat Indonesia.

Adat misalnya; memiliki peran penting sebagai sumber nilai dalam penerapan Restorative Justice (RJ) di Indonesia.⁷⁴ Adat menekankan pentingnya harmoni dan keseimbangan dalam masyarakat, yang sejalan dengan prinsip-prinsip RJ yang berfokus pada pemulihan hubungan dan reparasi kerugian. Melalui praktik seperti musyawarah dan mufakat, komunitas adat menyelesaikan konflik dengan cara deliberasi dan konsensus, yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang memulihkan hubungan sosial. Selain itu, hukum adat sering kali melibatkan tindakan kompensasi kepada korban dan masyarakat,

⁷⁴ Nabilla N. Afifah, "Perbandingan Antara Pendekatan Keadilan Restoratif Dan Pendekatan Hukum Adat Dalam Kasus Tindak Pidana Ringan," *JOURNAL SYNTAX IDEA* 1, no. 06 (2024): 4–6.

mencerminkan prinsip RJ yang menekankan reparasi atas kerugian yang disebabkan. Dalam Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : B/3022/XXI/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009, ditemukan diktum; Proses Mediasi Penal harus menghormati norma hukum sosial/adat yang berlaku di masyarakat tempat kasus tersebut terjadi, serta memenuhi azas keadilan dalam penyelesaiannya.

Selanjutnya Nilai-nilai agama, terutama Islam, juga berperan penting dalam RJ di Indonesia. Ajaran Islam menekankan pentingnya pengampunan, rekonsiliasi, dan pemulihan hubungan. Konsep seperti islah (rekonsiliasi) dan diyat (kompensasi) menjadi bagian integral dalam penyelesaian sengketa secara restoratif.⁷⁵ Komunitas Islam sering kali melibatkan pemimpin agama dan anggota masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa, mirip dengan praktik adat, untuk memastikan bahwa resolusi yang dicapai diterima secara sosial dan berkelanjutan. Praktik mediasi dan arbitrase dalam hukum Islam, seperti sulh (mediasi) dan tahkim (arbitrase), juga sejalan dengan prinsip-prinsip RJ yang mendorong dialog dan negosiasi untuk menyelesaikan konflik.⁷⁶

Sistem hukum nasional Indonesia mengakui pentingnya adat dan agama dalam berbagai undang-undang dan peraturan. Misalnya, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengintegrasikan nilai-nilai lokal dan agama dalam hal-hal terkait hukum keluarga. Inisiatif seperti Mediasi Penal⁷⁷ dan program RJ berbasis komunitas sering kali memanfaatkan praktik adat dan agama untuk memediasi kasus-kasus kriminal ringan dan mencapai hasil restoratif. Selain itu, pengadilan dan aparat penegak hukum mungkin mempertimbangkan adat dan agama dalam proses pengambilan keputusan mereka, terutama di wilayah dengan pengaruh adat dan agama yang kuat.

Keanekaragaman budaya Indonesia menimbulkan tantangan dalam standarisasi praktik RJ. Namun, keanekaragaman ini juga menawarkan kekayaan

⁷⁵ Galang Rizqan Thayiban, *Restorative Justice Pada Kuhp Baru Di Indonesia Perspektif Fiqih Jinayah*, 2024.

⁷⁶ R. Tanzil Fawaiq Sayyaf, "Mediasi Dan Sulh Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam," *Asy-Syariah: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 2 (2023): 180–198.

⁷⁷ Diah Sulastri, "Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Anak Indonesia" (Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya Jakarta, 2017). hal 61

tradisi restoratif yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan program RJ yang spesifik sesuai konteks lokal. Mengintegrasikan adat dan agama dengan hukum nasional memerlukan keseimbangan yang cermat untuk memastikan praktik-praktik lokal sejalan dengan prinsip hukum yang lebih luas dan standar hak asasi manusia. Keberhasilan program RJ sangat bergantung pada partisipasi aktif komunitas. Melibatkan pemimpin dan anggota masyarakat dalam desain dan pelaksanaan inisiatif RJ dapat meningkatkan efektivitas dan penerimaan program tersebut. Adat dan agama memberikan sumber nilai dan praktik yang berharga dalam penerapan Restorative Justice di Indonesia. Dengan memanfaatkan tradisi-tradisi ini, Indonesia dapat mengembangkan program RJ yang relevan secara budaya, berbasis komunitas, dan efektif dalam mempromosikan harmoni sosial dan keadilan.

I. Restorative Justice dan Hukum Islam

Salah satu Kritik terhadap penerapan hukum pidana di Indonesia seringkali menyoroti pendekatan yang terlalu formalistik dan represif, yang kurang mengapresiasi posisi korban maupun pelaku tindak pidana. Pendekatan ini mengakibatkan hukum pidana terlihat hanya sebagai alat pembalasan belaka. Proses penegakan hukum yang ada saat ini cenderung berfokus pada undang-undang semata, tanpa mempertimbangkan faktor sosiologis, filosofis, dan faktor lainnya yang lebih luas. Ketiadaan pemahaman mendalam akan filosofi dari tujuan pembuatan hukum itu sendiri menyebabkan terjadinya disorientasi dalam penegakan hukum. Disorientasi ini terlihat dalam sistem pemidanaan yang lebih berorientasi pada pemenjaraan, tanpa mampu mengembalikan keseimbangan dan persatuan dalam masyarakat yang terganggu akibat suatu tindak pidana.⁷⁸

Dalam konteks ini, penerapan prinsip restorative justice dapat menjadi solusi yang relevan untuk mengatasi berbagai kekurangan dalam pendekatan hukum pidana yang ada. Restorative justice menekankan pada pemulihan kerugian, rekonsiliasi, dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Prinsip ini menitikberatkan pada dialog antara korban dan pelaku, serta mencari

⁷⁸ Ahmad Ropei, "Penerapan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Pidana Berdasarkan Hukum Pidana Islam," *AL-KAINAH: Journal Islamic Studies* 1, no. 2 (2022): 40–83.

penyelesaian yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Dengan mengedepankan pendekatan yang lebih humanis dan holistik, *restorative justice* tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Pendekatan ini berpotensi mengembalikan keseimbangan dan persatuan dalam masyarakat, sehingga tujuan utama dari penegakan hukum, yaitu mencapai keadilan yang hakiki, dapat lebih diwujudkan.

Hukum pidana Islam membedakan dirinya dari sistem *retributive justice* dengan menempatkan fokus utama pada pemulihan dan penyelesaian masalah sosial yang muncul akibat tindak pidana. Tujuan utamanya bukan hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat yang terganggu. Pendekatan ini mengakui bahwa setiap tindak pidana tidak hanya merugikan individu secara pribadi, tetapi juga merusak hubungan sosial dan moral di antara anggota masyarakat. Oleh karena itu, sanksi pidana dalam hukum pidana Islam dapat diadaptasi sesuai dengan dinamika keadilan hukum dan keadilan sosial yang berkembang dalam masyarakat, dengan memperhatikan konsep restitusi untuk memulihkan kerugian yang diderita oleh korban.

Restorative justice dalam konteks hukum pidana Islam juga menonjolkan tiga konseptualisasi utama: *encounter*,⁷⁹ *reparatif*,⁸⁰ dan *transformative*⁸¹. Pertemuan langsung antara korban, pelaku, dan masyarakat bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan secara langsung dan memulihkan hubungan yang

⁷⁹ Mengacu pada proses di mana pelaku, korban, dan pihak-pihak terkait lainnya bertemu untuk membahas dampak dari tindak pidana yang terjadi. Tujuannya adalah untuk menciptakan ruang dialog yang aman di mana semua pihak dapat menyampaikan perasaan, pengalaman, dan pandangan mereka tentang kejadian tersebut. Dalam pertemuan ini, pelaku diberi kesempatan untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka, sementara korban dapat menyampaikan dampak yang mereka rasakan, serta kebutuhan mereka untuk pemulihan.

⁸⁰ Tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana. Tindakan ini dapat berupa kompensasi materi, permintaan maaf, atau tindakan konkret lainnya yang ditujukan untuk memulihkan keadaan korban dan mengurangi dampak negatif yang mereka alami. Pendekatan ini menekankan pentingnya mengembalikan kerugian yang telah dialami oleh korban dan memulihkan hubungan sosial yang terganggu.

⁸¹ Perubahan mendalam yang terjadi sebagai hasil dari proses keadilan restoratif. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki kerugian yang telah terjadi, tetapi juga untuk mengubah kondisi sosial yang mendasari tindak pidana tersebut.

terganggu.⁸² Selain itu, proses restoratif tidak hanya berfokus pada perbaikan materil, tetapi juga pada pemulihan empati, pemberdayaan, dan transformasi sosial yang mendalam. Dengan demikian, hukum pidana Islam menganut filosofi yang berpusat pada mengembalikan keharmonisan sosial dan membangun masyarakat yang lebih baik melalui pendekatan yang proaktif dan holistik terhadap penyelesaian konflik.

Selanjutnya, pendekatan hukum pidana Islam⁸³ yang mengutamakan restorative justice tidak hanya memberikan penekanan pada penyelesaian konflik dan pemulihan kerugian, tetapi juga pada transformasi sosial yang lebih luas. Konsep transformatif dalam konteks ini menunjukkan upaya untuk mengubah cara individu dan masyarakat berinteraksi dengan hukum dan keadilan. Hal ini mencakup pembentukan nilai-nilai empati, keadilan, dan tanggung jawab sosial yang lebih kuat di antara anggota masyarakat.

Dengan menerapkan *restorative justice*, hukum pidana Islam tidak sekadar mencari keadilan melalui hukuman, tetapi juga melalui proses-proses yang membangun kembali solidaritas dan hubungan yang saling menghargai dalam masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, baik sebagai pelaku maupun korban, untuk berpartisipasi aktif dalam proses rekonsiliasi dan pembangunan kembali norma-norma sosial yang terganggu.

Secara keseluruhan, karakteristik hukum pidana Islam yang berorientasi pada restorative justice mencerminkan komitmen terhadap pemulihan, rekonsiliasi, dan transformasi sosial. Ini bukan hanya tentang menanggapi tindak pidana secara punitif, tetapi juga tentang membangun masyarakat yang lebih adil, harmonis, dan berlandaskan nilai-nilai keadilan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Restorative justice dalam konteks hukum Islam menonjolkan karakteristik khusus yang membedakannya dari sistem hukum lainnya. Integrasi

⁸² <https://ilmusyariahdoktoral.Uin-Suka.Ac.Id/Id/Liputan/Detail/2781/Islamic-Restorative-Justice-Dan-Penegakan-Hukum-Yang-Berkeadilan>

⁸³ Ariyani Ariyani, Fikri, and Andi Marlina, "The Concept of Al-Islam and the Restorative Justice Approach in Settlement of Criminal Cases," *Delictum : Jurnal Hukum Pidana Islam* (2023): 28–43.

dari tiga aspek utama — *Legal, Moral, dan Spiritual*⁸⁴ — memberikan dimensi yang holistik dalam penyelesaian masalah hukum dan sosial.

Aspek Legal dari restorative justice dalam Islam bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum *ta'abbudi* (yang berhubungan dengan perintah agama) dan *ta'aqquli* (yang berhubungan dengan pertimbangan rasional). Ini mencakup penentuan hukum-hukum mandub (disukai) dan makruh (tidak disukai), yang tidak hanya memandu perilaku individu namun juga membantu dalam pengaturan sosial.⁸⁵

Aspek Moral dari restorative justice berfokus pada mewujudkan keadilan sosial di dalam masyarakat. Ini tercermin dalam penerapan sanksi hukum seperti sanksi moral, di mana pelaksanaan hukuman di tempat terbuka memberikan efek jera dan pembelajaran sosial kepada masyarakat.

Aspek Spiritual dalam restorative justice Islam bertujuan untuk mereformasi pelaku kejahatan melalui konsep kaffarat (penebusan) sebagai bentuk taubat dan pemulihan spiritual. Kaffarat ini melibatkan tindakan seperti membebaskan budak atau memberi makan fakir miskin, yang tidak hanya menegakkan keadilan individual tetapi juga menyumbang pada keadilan sosial secara lebih luas.

Keadilan dalam sistem hukum Islam tidak hanya mempertimbangkan keadilan legal (*legal justice*) tetapi juga keadilan sosial (*social justice*). Ini berarti tidak hanya menegakkan hukum secara adil, tetapi juga memastikan bahwa hak-hak korban, pelaku, dan masyarakat diperhatikan dan dipulihkan. Restorative justice dalam Islam, dengan demikian, mengintegrasikan aturan hukum sebagai kontrol sosial dan pelibatan aktif korban, pelaku, dan masyarakat sebagai upaya rekayasa sosial untuk memulihkan dan membangun kembali harmoni dalam masyarakat. Pendekatan ini menjadikan hukum Islam sebagai instrumen yang komprehensif dalam menangani konflik serta mempromosikan keadilan yang berkelanjutan dan inklusif.

Di Dalam Al-Qur'an secara tegas dinyatakan hukuman bagi pencuri dengan potong tangan, sebagaimana firman alah SWT;

⁸⁴ Ali Sodiqin, "Legal, Moral, and Spiritual Dialectics in the Islamic Restorative Justice System," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 21, no. 2 (2021): 357–378.

⁸⁵ Ibid.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Adapun laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan terhadap apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana."⁸⁶

Ayat ini merupakan perintah Allah untuk memberikan hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian baik laki-laki maupun perempuan, sebagai balasan atas perbuatan mereka dan sebagai pencegahan dari Allah. Ayat ini menunjukkan sifat Allah yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana dalam menetapkan hukum-hukum-Nya.

Namun Khalifah Umar bin Khattab untuk menanggihkan hukuman hadd dalam kondisi sulit seperti musim kemarau panjang. dalam situasi di mana kebutuhan dasar seperti makanan sulit diperoleh karena kekeringan yang parah, Umar bin Khattab memutuskan untuk menunda penerapan hukuman hadd, Ini mencerminkan pendekatan yang berpihak kepada kemaslahatan umat dan menunjukkan penggunaan kebijaksanaan (hikmah) dalam menghadapi situasi ekstrem yang tidak terduga dalam penerapan hukum Islam.⁸⁷

Khalifah Umar menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dengan mempertimbangkan prinsip ihtihans atau kebijaksanaan dalam keadaan darurat. Ketika musim paceklik dan kemarau panjang melanda, banyak masyarakat yang mengalami kelaparan. Dalam situasi tersebut, Umar memutuskan untuk tidak menjatuhkan hukuman potong tangan pada pelaku pencurian yang mencuri demi bertahan hidup. Keputusan ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya berfokus pada teks, tetapi juga memperhatikan konteks dan kondisi yang melingkupi pelanggaran.⁸⁸

Keputusan Khalifah Umar mencerminkan aspek kemanusiaan dalam hukum Islam, di mana keadilan tidak semata-mata dilihat dari penegakan hukum secara kaku, tetapi juga dari upaya memahami dan merespons kondisi nyata yang dihadapi masyarakat. Dalam konteks kelaparan dan kebutuhan mendesak,

⁸⁶ QS. Al-Maidah (5) ayat 38

⁸⁷ Alma`arif Alma`arif, "Kesadaran Hermeneutik Dalam Membaca Teks: Model Ijtihad Umar Ibn Al-Khattab," *Al-A`raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat* 13, no. 2 (2016): 191.

⁸⁸ Qadriani Arifuddin, "Ijtihad Umar Bin Khattab Dan Relevansinya Terhadap Hukum Islam Kontemporer," *JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 3, no. 1 (2021): 69–83.

penerapan hukuman potong tangan dianggap tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan belas kasih. Oleh karena itu, hukum umum dapat dialihkan ke hukum khusus yang lebih tepat sesuai dengan situasi darurat. Narasi ini menunjukkan bahwa hukum Islam mengandung keluwesan dalam aplikasinya, dengan mempertimbangkan masalah (kemaslahatan umum) dan darurat, sehingga mencapai keadilan yang hakiki dan merangkul sisi kemanusiaan yang ada dalam masyarakat.

Pendekatan yang dilakukan Khalifah Umar ini sejalan dengan prinsip restorative justice yang menekankan pemulihan kerugian, rekonsiliasi, dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Dalam restorative justice, keadilan dicapai bukan hanya melalui penghukuman, tetapi juga melalui dialog, pemahaman, dan penyelesaian yang memperbaiki dampak kejahatan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan tidak menjatuhkan hukuman potong tangan, tetapi memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri dan menebus kesalahan mereka, Umar menunjukkan bahwa hukum dapat digunakan untuk memulihkan dan memperkuat ikatan sosial, bukan hanya untuk menghukum. Ini mencerminkan tujuan akhir dari keadilan restoratif yang mencari keseimbangan antara keadilan, kemanusiaan, dan pemulihan harmoni sosial.

J. Kearifan Lokal

Indonesia adalah negeri yang kaya akan budaya, tradisi, dan adat istiadat. Sebagai bangsa yang terdiri dari berbagai suku, Indonesia memiliki warisan nilai-nilai luhur yang telah menjadi pedoman hidup masyarakat sejak zaman lampau. Kearifan lokal yang tertanam dalam setiap tradisi tidak hanya menjadi simbol kebanggaan, tetapi juga cerminan dari jati diri bangsa. Warisan ini menunjukkan bagaimana masyarakat Indonesia secara turun-temurun mampu menjaga harmoni antara manusia, alam, dan Sang Pencipta, sehingga menciptakan kehidupan yang selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan spiritualitas.

Adat atau kebiasaan sebagai bentuk kearifan lokal (*local wisdom*) mencerminkan nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Keberadaannya yang telah ada sejak zaman lampau tetap hidup di

beberapa daerah, bahkan menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat. Kearifan lokal ini tidak hanya sekadar ritual adat atau upacara religi, tetapi mencakup keseluruhan aspek kehidupan yang mengatur hubungan antara manusia dengan pencipta, lingkungan, sesama manusia, dan masa depan yang dicita-citakan.⁸⁹ Sebagai warisan budaya, kearifan lokal ini juga berfungsi sebagai identitas kolektif yang menguatkan rasa persatuan dan membentuk karakter bangsa, menjadikannya relevan di tengah perubahan zaman yang dinamis.

Sebagai fondasi kehidupan bermasyarakat, nilai-nilai ini membentuk pola hubungan yang harmonis dan saling menghormati di tengah keberagaman. Nilai-nilai ini tidak hanya berfungsi sebagai aturan sosial, tetapi juga mencerminkan cara masyarakat berinteraksi dengan sesama dan lingkungan mereka. Menurut Koentjaraningrat,⁹⁰ dan Selo Soemardjan⁹¹ Gotong royong, musyawarah mufakat, serta penghormatan terhadap orang tua dan sesepuh menjadi prinsip dasar yang menguatkan hubungan sosial dalam komunitas. Nilai-nilai ini tidak hanya mendorong kebersamaan, tetapi juga menjadi perekat sosial yang mengatasi konflik dan perbedaan. Selain itu, tanggung jawab sosial dan kearifan lokal juga merupakan bagian integral yang mengajarkan pentingnya kepedulian terhadap lingkungan dan kesejahteraan bersama. Nilai-nilai ini menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif, menjadikan komunitas sebagai ruang yang adil dan berkelanjutan. Dalam banyak kasus, nilai-nilai ini juga diintegrasikan dengan ajaran agama yang menguatkan rasa kesetaraan, keadilan, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.

Kearifan lokal Menurut Ridwan, N.A.⁹² dapat dipahami sebagai budaya atau hasil akal budi manusia yang berkembang dari pengalaman panjang dan interaksi masyarakat dengan lingkungannya.

⁸⁹ Imam Mahdi dan Etri Mike. *Aktualisasi Nila-Nilai Kearifan Lokal Penataan Kemasyarakatan Di Kabupaten Rejang Lebong (Studi Kasus Peraturan Daerah Pembentukan Masyarakat Adat)*. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. Vol. 1. Bengkulu: Zera Abadi, 2022, hal 1

⁹⁰ Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Gramedia Pustaka Utama, 2005, hal. 23

⁹¹ Soemardjan, Selo, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Rajawali Press, 2000, hal. 45

⁹² Ridwan, N. A. *Landasan Keilmuan Kearifan Lokal*. P3M STAIN, Purwokerto IBDA, Vol. 5, No. 1, Jan-Juni 2007, hal. 27-38

Pemahaman ini menunjukkan bahwa kearifan lokal bukan sekadar warisan budaya yang statis, melainkan suatu bentuk pengetahuan yang dinamis. Ia terbentuk dari pengalaman masyarakat dalam mengatasi tantangan dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar mereka. Interaksi yang berlangsung antara manusia dan lingkungan, baik alam maupun sosial, membentuk nilai-nilai yang bersifat adaptif dan relevan dengan perubahan zaman. Oleh karena itu, kearifan lokal berfungsi sebagai strategi hidup yang membantu masyarakat tidak hanya dalam mempertahankan tradisi, tetapi juga dalam menghadapi perubahan dan tantangan masa depan secara berkelanjutan.

Menurut Ahimsa Putra⁹³, Kearifan lokal merupakan seperangkat pengetahuan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan telah diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang.

Kearifan lokal ini mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti, mengelola lingkungan, hingga aturan sosial yang membentuk pola hubungan antaranggota masyarakat. Keberlanjutan kearifan lokal ini menandakan betapa pentingnya peran generasi sebelumnya dalam membimbing generasi berikutnya, agar mereka tetap terhubung dengan akar budaya dan nilai-nilai yang ada. Pengetahuan yang diwariskan ini tidak hanya relevan dalam konteks budaya, tetapi juga memberikan solusi praktis yang mampu menjawab tantangan zaman. Oleh karena itu, kearifan lokal berfungsi sebagai pondasi penting dalam menjaga keseimbangan sosial, lingkungan, dan ekonomi, serta menciptakan kesadaran untuk hidup harmoni dengan alam dan sesama.

Sedangkan menurut Koentjaraningrat dalam buku *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*⁹⁴ Kearifan lokal dipandang sebagai pandangan hidup, ilmu pengetahuan, dan berbagai strategi kehidupan yang terwujud dalam aktivitas masyarakat lokal untuk menjawab berbagai tantangan serta memenuhi kebutuhan mereka. Koentjaraningrat menekankan bahwa kebudayaan, termasuk kearifan lokal, memainkan peran penting dalam membentuk mentalitas

⁹³ Ahimsa Putra. "Ilmuwan Budaya dan Revitalisasi Kearifan Lokal: Tantangan Teoritis dan Metodologis." Makalah disampaikan pada Rapat Senat Terbuka Dies Natalis ke-62, Fakultas Ilmu Budaya UGM, Yogyakarta, 2008.

⁹⁴ Koentjaraningrat. *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*. PT Gramedia, Jakarta, 1985 hal 23

masyarakat dan menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan yang berbasis budaya.

Dalam konteks Peradilan *Jenang Kutei* kearifan lokal merupakan landasan penting dalam sistem penyelesaian konflik berbasis adat, termasuk dalam praktik Peradilan *Jenang Kutei* di masyarakat Suku Rejang. Sistem ini mengintegrasikan nilai-nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun dengan pendekatan *restorative justice* dan prinsip-prinsip hukum Islam, yang bertujuan untuk menciptakan harmoni sosial.⁹⁵

Nilai-nilai seperti musyawarah untuk mufakat (*syura*) menjadi metode utama untuk menyelesaikan perkara pidana. Hal ini sejalan dengan prinsip *islah* dalam hukum Islam, yang menekankan penyelesaian konflik melalui perdamaian, menjaga kehormatan pihak yang *bersengketa*, dan mengutamakan pemulihan hubungan sosial⁹⁶ Selain itu, pendekatan ini juga memperhatikan kearifan lokal yang berorientasi pada penguatan rasa keadilan masyarakat, efisiensi waktu dan biaya, serta pelestarian nilai-nilai budaya yang mendukung terciptanya kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan berkelanjutan.

⁹⁵ Rahyono, F. X. *Kearifan Lokal dalam Perspektif Budaya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010. hal. 25.

⁹⁶ Al-Mawardi, Abu al-Hasan. *Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*. Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut, 1996, hal. 287